

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon

Janet Wilsye Litaly

Program Studi Akuntansi, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura-Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)

Corresponding Author e-mail: janetwilsye@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan faktor eksternal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah kota Ambon. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang berada di Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, sedangkan sampel yang dijadikan sebagai unit analisis pengujian adalah sebanyak 50 pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sample*. Selain itu dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner sedangkan metode analisis data menggunakan teknik analisis Regresi Berganda. Berdasarkan hasil analisis secara empiris diperoleh hasil bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Disisi lain, sistem pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan untuk variabel faktor eksternal ditemukan hasil yang berbeda yakni tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan dari hasil perhitungan faktor eksternal lebih besar dari nilai signifikansi 5%.

Kata kunci : Faktor Eksternal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia

Received: 5 Februari 2020

Accepted: 1 Maret 2020

© 2020 Janet Wilsye Litaly

A. PENDAHULUAN

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).

Terdapat 3 mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu : (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki internal *rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah (Mardiasmo, 2006).

Hal serupa juga terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk mewujudkan *good governance*, maka upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan reformasi mengenai laporan keuangan. Green (1991) dalam teori kepatuhan, mengemukakan bahwa kepatuhan merupakan perilaku yang patuh kepada aturan yang ada. Kepatuhan pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan aturan merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan.

Demikian juga dengan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Banyak aturan yang dikeluarkan terkait dengan laporan keuangan yaitu pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Serta yang terakhir pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai laporan keuangan berbasis akrual.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri and Trihapsari, 2004). Selanjutnya, Badjuri and Trihapsari (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Namun pada kenyataannya pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terlebih khusus tanggung jawab laporan keuangan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam fenomena yang terjadi pada pemerintah Kota Ambon. Berikut dibawah ini adalah hasil opini oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon di 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2010 - 2014 :

Tabel 1. Opini BPKP terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Ambon 2010 - 2014.

Tahun	Opini
2010	<i>Disclaimer</i>
2011	<i>Disclaimer</i>
2012	<i>Disclaimer</i>
2013	WDP
2014	WDP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon (2010 - 2014)

Tabel 1, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2012 laporan keuangan Kota Ambon mendapatkan opini *disclaimer*. Menurut penjelasan yang diberikan langsung oleh narasumber Kasubid Akuntansi BPKK bahwa alasan mendasar BPKP sehingga memberikan opini *disclaimer* adalah karena : 1) Sistem pengendalian internal yang belum baik, 2) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, 3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, 4) Terlambat menyampaikan laporan, 5) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Kemudian ditahun 2013 - 2014 laporan keuangan pemerintah Kota Ambon mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa setelah sebelumnya mendapatkan opini *disclaimer* maka harus ada perubahan yang besar dalam lingkup pemerintah Kota Ambon baik secara internal maupun eksternal yang membuat penatalayanan pemerintah kota Ambon semakin baik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, faktor yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, apalagi sekarang ini proses pembuatan laporan keuangan semuanya dilakukan dengan menggunakan sistem, sehingga pemahaman pegawai tentang sistem juga sangat penting dan mempengaruhi pekerjaan dalam membuat laporan keuangan. Jika sumber daya manusia tidak memadai dan tidak kompeten maka akan mempengaruhi laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pekerjaan yang dilakukannya (Desi dan Ertambang, 2008). Alasan menggunakan faktor sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah karena untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian internal. Dalam penelitian Xu *et al.*, (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. SPI merupakan faktor penting dalam mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan serta kualitas laporan keuangan pemerintah. Kelemahan dalam SPI pemerintah memberikan pengaruh kepada kualitas laporan keuangan sehingga belum bisa dilakukan dengan optimal.

Dalam Teori *Stewardship*, teori ini menjelaskan bahwa manajemen organisasi sebagai *Steward* akan bertindak dengan penuh kesadaran dan arif bagi kepentingan organisasi (Donaldson and Davis, 1991). Pemerintah sebagai *Steward* harus menyadari bahwa kepentingan sebagai organisasi publik harus sejajar dan selaras dengan kepentingan masyarakat (*principal*). Salah satunya yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendapat opini yang baik. Dengan demikian masyarakat semakin percaya terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor eksternal atau lingkungan eksternal. Menurut Reni (2013), faktor eksternal adalah kondisi lingkungan organisasi yang secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan. Indikator dari faktor eksternal adalah terkait dengan kemajuan dan perkembangan IT, dan *Web* serta regulasi. Teknologi yang semakin maju, memberikan ruang kepada pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut penjelasan yang diberikan langsung oleh Kasubid Akuntansi, faktor eksternal dalam hal ini kemajuan IT, *web*, dan regulasi bukan hanya sekedar menjadi faktor pendukung akan tetapi merupakan faktor utama dan sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun semuanya itu bukan berarti dalam proses pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan sistem tidak ada masalah atau tidak ada kendala yang dihadapi. Akan tetapi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas maka semuanya faktor yang ada perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah.

Selanjutnya perubahan regulasi atau standar merupakan faktor eksternal yang juga bisa mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, hal ini bisa dilihat dari perubahan regulasi dari PP 24 Tahun 2005 yang diganti menjadi PP 71 Tahun 2010, yang mana terjadi

perubahan dari SAP berbasis kas menjadi SAP berbasis akrual. Perubahan *rules* inilah yang mau tidak mau harus diikuti dan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten yang siap dengan segala perubahan, karena nantinya menyangkut kualitas laporan keuangan. Alasan menggunakan faktor eksternal ini sebagai variabel independen karena unsur-unsur dari faktor eksternal ini sangat penting, karena pada dasarnya perubahan IT pada pemerintah sangatlah penting dalam proses pembuatan laporan keuangan, dan juga untuk transparansi pemerintah kepada publik. Selain itu, regulasi merupakan dasar pijak pemerintah dalam bekerja, maka hal ini jugalah yang nantinya mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu ketiga faktor ini saling berkaitan erat dan penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti and Nicky (2008) dengan judul penelitiannya pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan dan implikasinya terhadap kualitas pemeriksaan pajak, dan Reni (2013) dengan penelitian yang berjudul pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel pemoderasi.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu dalam melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, maka peneliti menggunakan variabel sumber daya manusia (X1), sistem pengendalian internal (X2). Penelitian ini tidak mengambil variabel kualitas pemeriksaan pajak karena penelitian ini lebih berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi pemerintah dan tidak mengaitkan dengan pemeriksaan pajak. Selain itu penelitian ini menggunakan variabel faktor eksternal (X3) sebagai variabel independen untuk menguji secara langsung dengan kualitas informasi laporan keuangan (Y). Reni (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor eksternal tidak dapat berperan sebagai variabel moderasi dengan alasan bahwa faktor eksternal bukan hanya sekedar faktor pendukung atau pelengkap saja dalam pembuatan laporan keuangan namun faktor eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Tanpa adanya faktor eksternal maka proses pembuatan laporan keuangan tidak bisa berjalan dengan baik. Berbicara mengenai faktor eksternal berarti berbicara terkait dengan kemajuan IT, *web*, dan regulasi. Dalam membuat laporan keuangan harus berdasarkan aturan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, dan dalam membuat laporan keuangan semuanya harus dengan menggunakan sistem. Hal ini tidak terelakkan dan tidak bisa dihindari serta harus dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berhak mengelola keuangannya sendiri, oleh karena itu pemerintah harus transparan dalam pengelolaan laporan keuangan sektor publik. Hal ini merupakan fenomena yang riil dan menjadi sorotan penting serta tolak ukur dalam mewujudkan *Good Governance*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Kota Ambon, untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Ambon dan untuk menguji secara empiris pengaruh faktor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Ambon.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Ambon. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai BPKK yang bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan laporan keuangan yakni sebanyak 50 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang memberikan peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Sekaran, 2003). Karena jumlah populasi pada penelitian ini relatif kecil 54 orang dan hanya pada satu kantor yakni Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dan oleh karena itu semua anggota populasi dijadikan sampel maka metode yang digunakan adalah metode sampling jenuh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil penelitian, model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah : $Y = 20.247 + 0.493 X_1 + 0.542 X_2 - 0.019 X_3$. Koefisien determinan (*Adjusted R Square*) sebesar 0.575 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel sumber daya manusia (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan faktor eksternal (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 57.5% dan sisanya 43.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Hasil analisis regresi linear berganda, maka secara parsial, untuk variabel sumber daya manusia (X_1) diperoleh nilai signifikansi $0.004 < 0.05$. Karena nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti H_1 diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa sumber daya manusia (X_1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Selanjutnya, pengujian secara parsial untuk variabel sistem pengendalian internal (X_2) diperoleh nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Karena nilai signifikansi $0.001 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti H_2 diterima atau terbukti signifikan, atau dengan kata lain sistem pengendalian internal (X_2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Kemudian pengujian parsial untuk variabel faktor eksternal (X_3) diperoleh nilai signifikansi $0.965 > 0.05$ maka dapat H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa H_3 ditolak atau terbukti tidak signifikan. Jadi faktor eksternal (X_3) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Hasil Uji Hipotesis Pertama (H_1) Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan adanya bukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya manusia (X_1) dengan kualitas laporan keuangan (Y). Pengaruh antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah adalah semakin baik sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin baik.

Hasil ini juga didukung oleh teori kepatuhan, karena berdasarkan perspektif normatif yang dikemukakan oleh Septiani (2005) menunjukkan bahwa kepatuhan merupakan hal yang mutlak yang harus dipatuhi oleh setiap instansi. Dalam hal ini lebih ditekankan kepada

sumber daya manusia, karena sumber daya manusia itulah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan pemerintah.

Sejalan dengan hal itu juga maka ketika sumber daya manusia dalam melakukan tugas dan tanggung jawab keuangan dengan berpedoman dan patuh terhadap standar dan aturan yang harus diikuti maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Dengan adanya hasil yang berpengaruh signifikan ini maka dapat dikatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia pada lingkup Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sudah baik.

Selain itu juga uraian tugas dan fungsi antara sub bagian yang ada pada BPKK juga sudah spesifik dan sangat jelas sehingga tidak ada pekerjaan yang tumpah tindih, dan masing-masing pegawai sudah mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Xu *et al.* (2003) dan Reni (2013)

Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2) pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan di pemerintah kota Ambon dalam hal ini pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan pengendalian internal yang efektif merupakan kunci keberhasilan peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Semakin efektif pengendalian internal akan berdampak meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan asumsi teori *Stewardship* yaitu *governance*. Asumsi *governance* pada penelitian ini adalah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Analisis kelima unsur variabel pengendalian intern hasilnya menunjukkan secara umum mempunyai nilai yang tinggi dan mampu memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar mengaplikasikan teori *stewardship* di lembaga pemerintahan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Desi and Ertambang (2008), dan Tantriani (2012) yaitu pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum and Rahmawati (2010) bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan.

Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H3) pengaruh faktor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan bahwa hasil penelitian pada hipotesis ketiga ini berbeda dengan hasil pada hipotesis sebelumnya yakni pada hasil pengujian hipotesis ketiga hasilnya tidak signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara faktor eksternal dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini karena setelah dibuktikan dilapangan yakni walaupun standar yang baru sudah dikeluarkan tidak serta merta ditahun yang sama saat aturan dikeluarkan harus diikuti. Contoh riilnya PP 71 dikeluarkan pada tahun 2010 namun baru diterapkan di Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena walaupun PP 71 sudah dikeluarkan namun karena Badan pengelola keuangan berada dibawah kementerian dalam negeri sehingga harus

menunggu regulasi yang dikeluarkan yakni Permendagri 64 Tahun 2015. Oleh karena itu tidak akan mempengaruhi proses akuntansi yang telah berjalan dalam pemerintah Kota Ambon dalam hal ini pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Tantriani (2012) dan Reni (2013) yang juga hasil penelitian mereka menyatakan bahwa faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Xu *et al.* (2003) bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh penting terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka diperoleh beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hasil pengujian statistik untuk hipotesis pertama, menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah.
2. Hasil pengujian statistik untuk hipotesis kedua, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik sistem pengendalian pada lingkup pemerintah maka akan mempengaruhi dan akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Hasil pengujian statistik untuk hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Perkembangan dan pemanfaatan IT sebagai indikator tidak terlalu mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena karena ada banyak kendala seperti kurangnya tenaga operator sistem, dan kurangnya pemahaman terhadap sistem. Selain itu Perubahan regulasi tidak sering terjadi, sehingga tidak akan mempengaruhi proses akuntansi yang telah berjalan, yang pada akhirnya tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini ada beberapa saran yang akan diberikan sebagai bahan pertimbangan, serta masukan dari peneliti untuk Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Lebih meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola keuangan daerah yaitu dengan meningkatkan keterlibatan pegawai pengelola keuangan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan sehingga kompetensi sumber daya manusia yang ada semakin menjadi lebih baik lagi. Serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang teladan dan bebas temuan audit.
2. Meningkatkan keefektifan sistem pengendalian internal dengan baik bukan hanya disaat tertentu saja seperti saat akan terjadinya proses audit, tetapi selalu menjaga keefektifan sistem pengendalian internal setiap saat sehingga menjadi hal yang penting dan terutama serta dapat dipatuhi oleh seluruh pegawai dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon.

3. Dalam penggunaan sistem, maka Badan Pengelola Keuangan Kota perlu menambah tenaga operator SIMDA, kemudian diberikan pelatihan tentang penggunaan sistem tersebut sehingga dalam proses pembuatan laporan keuangan lebih maksimal dan berkualitas serta tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri Achmad, Elisa Trihapsari. 2004. Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah. *Jurnal*.
- Donaldson L, Davis J. H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance & Shareholder Return. *Australian Journal of Management*. Pp 49-64. The University of New South Wales.
- Green W. 1991. Health Promotion Planning An Education and Environmental Approach. Second Edition. Columbia: Mayfield Publishing Company.
- Indriasari Desi, Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir). SNA XI Pontianak.
- Mardiasmo. 2002. Elaborasi reformasi akuntansi sektor publik : Telaah kritis terhadap uapaya aktualisasi kebutuhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. FE UII Yogyakarta, 6(1):63-82.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- Reni Yendrawati. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor Eksternal sebagai variabel moderating. Jogjakarta: *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 17(2):165-174.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.
-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- -----, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
-----, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.
- Septiani Aditya. 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada pasar modal yang sedang berkembang : Perspektif teori pengungkapan. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siti, Nicky. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Laporan Penelitian
- Tatriani Sukmaningrum. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualiatas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal*.
- Widyaningrum, Rahmawati. 2010. Pengaruh SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten. Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XII
- Xu Honjiang, Lin Binshan, Nord Daryl Jeretta. 2003. Key issues of accounting Information Quality Management: Australian Case Study, Sistem Informasi Bisnis Departemen. College of Business Administration. *Central Michigan University*, 103(7): 461-470.